

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
(BAPEPAM-LK) TERHADAP PERUSAHAAN EFEK TERKAIT PRINSIP
MENGENAL NASABAH DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
DI PASAR MODAL**

(Studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

YULIANI INDAH PERMATASARI

NIM.0910110089



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini membahas tentang Efektifitas Badan Pengawas Pasar Modal terhadap Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah sebagai pencegahan pencucian uang di pasar modal. Hal tersebut dilatarbelakangi semakin banyak investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Perusahaan Efek sebagai pintu masuk investor berinvestasi di pasar modal harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah agar tidak dijadikan sebagai lembaga pencucian uang oleh investor. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana efektifitas Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam mengawasi Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskanlah masalah mengenai (a) Bagaimana efektivitas pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal dan (b) Apa kendala dan upaya yang dihadapi Bapepam dalam mengawasi Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk mengetahui efektifitas Bapepam terhadap perusahaan efek terkait penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lokasi dan juga hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) belum efektif melakukan pengawasan terhadap perusahaan efek terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Namun saat ini Bapepam baru menjalankan program sosialisasi kepada perusahaan efek dalam melakukan Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa faktor penghambat dan upaya pengawasan Bapepam terhadap perusahaan efek terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu dilakukan sosialisasi dan pemantauan kepada perusahaan efek terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk menghindari terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah di pasar modal.

Kata Kunci : Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal Terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang Di Pasar Modal

ABSTRACT

This scientific article discusses the effectiveness of the Capital Market Supervisory Board relating to the Company's securities as a Know Your Customer Principles prevention of money laundering in the capital market. It is against the backdrop of a growing number of investors who invest in Indonesia capital market. Securities Company as an entry point to invest in the stock market investor should apply the Know Your Customer so as not to serve as an institution of money laundering by the investor. Issues raised is the extent to which the effectiveness of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) in overseeing the Company's Know Your Customer Principles related securities.

Based on this background defined issues concerning (a) How is the effectiveness of the Company's securities supervision of Bapepam in implementing Know Your Customer Principles for prevention of money laundering in the capital markets and (b) What are the constraints faced and efforts in implemeting the Company Bapepam-related effects of Know Your Customer.

To determine the effectiveness of Bapepam-related securities of companies recognize the customer as the application of the principles of money laundering prevention, the study uses an empirical approach to the method used juridical sociological approach. The collection of primary data obtained directly from the results of research on the location and also the results of the interview, while the secondary data obtained from the study of literature.

Based on the results obtained answers to existing problems that the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) ineffective oversight of securities firms related to the implementation of Know Your Customer. But now a new Bapepam socialization to the company running the program in effect doing the Know Your Customer. In practice also met several factors inhibiting and surveillance efforts Bapepam against brokers related to the implementation of Know Your Customer.

In response to these facts, it is necessary to socialize and monitoring the effects of the application of the company's Know Your Customer Principles to prevent money laundering by clients in the capital markets.

Keywords: Effective Supervision of Capital Market Supervisory Agency Against Related Securities Company Know Your Customer Principles Prevention of Money Laundering In Capital Markets

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang memiliki peran cukup penting bagi kondisi ekonomi makro dan pembangunan nasional. Pasar modal sebagai alternatif pendanaan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana.

Pasar modal dapat memberikan arti cukup penting dalam suatu perkembangan ekonomi dari suatu negara, karena pasar modal dapat berperan sebagai:¹

1. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter.
5. Menekan tingginya bunga.
6. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Perkembangan pasar modal Indonesia juga ditentukan oleh berbagai kinerja organisasi, yaitu Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Melihat struktur organisasi pasar modal, fungsi Bapepam merupakan komponen yang memegang peranan penting terhadap kemajuan pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1995 bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam.

Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini perusahaan efek diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Perusahaan efek sebagai pintu masuk

¹ Bapepam-LK, **Seluk Beluk Pasar Modal Indonesia**, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, 2004, hal 14.

utama calon investor melakukan jual beli saham diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan tujuan agar perusahaan efek dapat mengenali profil calon investor maupun karakteristik setiap transaksi investor sehingga perusahaan efek dapat memantau serta mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan kunci utama untuk melindungi dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul.

Mengingat bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting, maka Perusahaan Efek perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Peranan strategis yang dimiliki oleh Perusahaan Efek sebagai manajer investasi sangat bergantung pada sampai sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada Perusahaan Efek yang akan mengelola dana investor. *Trust* (kepercayaan) dari para pengguna jasanya. Ketidacukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat menimbulkan transaksi-transaksi mencurigakan. Keadaan demikian itu, akan mempermudah bagi pelaku pencucian uang untuk menggunakan sarana ekonomi yang sah guna menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan mereka dan untuk memudahkan kecepatan transfer hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang prinsip mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang di pasar modal yang dihubungkan dengan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang cukup tinggi sebagai pengawas, pembina, dan regulator sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan pengawasan serta sejauh apa efektifitas pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dalam mengawasi perusahaan efek terkait prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal serta kendala dan upaya yang dilakukan Bapepam dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal ?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi Bapepam dalam mengawasi Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu model metode pendekatan penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pencegahan pencucian uang di pasar modal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisa apakah pengawasan tersebut telah efektif atau belum dengan parameter efektifitas hukum melalui substansi, struktur, kultur, dan fasilitas yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Pembahasan

D.1 Gambaran Umum Bapepam

Bapepam pertama kali didirikan pada tahun 1972 dengan nama Badan Pembina Pasar Modal. Awal mulanya adalah tahun 1968, Tim Persiapan Pasar Uang dan Modal (PUM) dibentuk melalui Keputusan Direksi Bank Indonesia No.4/16.Kep.Dir. tanggal 26 Juli 1968, akan tetapi kemudian Tim Persiapan Pasar Uang dan Modal dibubarkan dan diganti dengan nama Tim Pasar Uang dan Modal melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-02/MK/IV/1970. Selanjutnya, Tim Pasar Uang dan

Modal dibubarkan dan diganti dengan Badan Pembina Pasar Modal melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-25/MK/IV/1/1972 tanggal 23 Januari 1972.

Lembaga yang disebut sebagai Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (Bapepum), yang dibentuk pada tahun 1972 tersebut bertugas membantu Menteri Keuangan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²

- 1) Melaksanakan pembinaan Pasar Uang dan Modal tahap demi tahap menurut situasi serta kebutuhan.
- 2) Mempersiapkan pembentukan Lembaga Pasar Uang dan Modal.
- 3) Melaksanakan pengawasan atas aktifitas Bursa Efek.

D.2 Pelaksanaan Pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bapepam harus obyektif jauh dari tekanan politik maupun kepentingan pihak ketiga lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 ditegaskan bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan dari instrumen yang tergabung dalam pasar modal.

a. Pengawasan Secara Preventif

Bentuk pengawasan Bapepam secara preventif dilakukan untuk menanggulangi pencucian uang di pasar modal akibat dari tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek.

- 1) Membuat regulasi dan peraturan yang mewajibkan perusahaan efek menerapkan prinsip mengenal nasabah ³

² M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, **Op.Cit.**, hal 69

³ Wawancara dengan Bapak Nurman Cahyadi, bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam, tanggal 19 November 2012, data primer telah diolah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 36 telah memberikan kewajiban bagi perusahaan efek untuk mengetahui latar belakang keadaan keuangan, tujuan investasi nasabahnya, serta membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai transaksi dan kondisi keuangan dari nasabahnya. Pasal-pasal tersebut menunjukkan usaha Bapepam sebagai regulator untuk menekan dan memberikan aturan atau ultimatum terhadap perusahaan efek bahwa semua perusahaan efek wajib untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah agar tidak terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

2) Pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan efek

b. Pengawasan secara Represif

Bentuk pengawasan Bapepam secara represif dilakukan untuk menanggulangi atau menangani terjadinya pencucian uang di pasar modal akibat dari tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek setelah terjadinya hal tersebut, sehingga upaya ini disebut juga sebagai tindakan penanganan.

D.3 Penanganan Kasus Pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah yang Ditangani Bapepam

1) Kasus Saham SUGI dan ARTI

Kasus PT. Sugi Sama Persada Tbk. (SUGI) dan PT. Arona Binasejati Tbk. (ARTI) terjadi pada tanggal 21 September 2005. Kasus itu bermula pada PT. Mentari Sekurindo yang melakukan transaksi pembelian saham PT. Sugi Sama Persada Tbk. (SUGI) dan PT. Arona Binasejati Tbk. (ARTI) dan pada tanggal yang sama PT. Suprasurya Danawan Sekuritas melakukan transaksi penjualan saham SUGI dan ARTI. Transaksi pembelian dan penjualan saham SUGI dan ARTI tersebut terjadi sebanyak 42 juta lembar dengan harga Rp 480/lembar

dengan total nilai transaksi sebesar Rp 20,16 miliar untuk saham SUGI, dan untuk saham ARTI sebanyak 40 juta lembar dengan harga Rp 720/lembar dengan total nilai transaksi sebanyak Rp 28,8 miliar. Banyak pihak yang mencurigai adanya perdagangan saham yang tidak wajar dalam transaksi ini. Karena saham SUGI dan ARTI adalah saham yang kurang begitu diminati. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam-LK, transaksi tersebut telah terjadi perdagangan semu dan atau manipulasi pasar dalam perdagangan saham serta pencucian uang. Namun untuk sekarang ini Bapepam baru menjatuhkan sanksi administratif.

Perusahaan Efek sangat memegang peranan dalam penerapan prinsip KYC. Dalam kasus diatas, pelanggaran disebabkan karena PT. Suprasurya Danawan Sekuritas dan PT. Mentari Sekurindo tidak menerapkan dengan baik:

- I. Pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek;
- II. Pengendalian interen; dan
- III. Prinsip Mengenal Nasabah.

Kelalaian perusahaan efek dalam menerapkan ketiga hal tersebut mengakibatkan pelanggaran atas Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

a. Sanksi administratif berupa denda terhadap:

- 1) PT. Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp 500.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) PT. Mentari Sekurindo sebesar Rp 500.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3) Sdr. Widiyanto, selaku Direktur PT. Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 4) Sdr. Antonius Lie, selaku Direktur Utama PT. Suprasurya Danawan Sekuritas sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5) Sdr. Alfian Susanto, selaku pihak yang memberikan order sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 6) Sdr. Djoko Sasongko, selaku Direktur Utama PT. Mentari Sekurindo sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 7) Sdr. Dedy Kusmayadi, selaku Direktur PT. Mentari Sekurindo sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Sanksi administratif berupa pencabutan seluruh izin Wakil di bidang pasar modal atas nama Sdr. Alfian Susanto.
 - c. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Sdr. Henny Simare-mare selama 12 (dua belas) bulan.

2) Kasus PT. KJS⁴

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Audit Kepatuhan Bapepam-LK terhadap PT KJS, diperoleh fakta:

- a. PT KJS belum menyampaikan laporan perubahan susunan dewan Direksi dan Komisaris kepada Bapepam dan LK.
- b. Direktur PT KJS tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek.
- c. PT KJS belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengawasan internal dan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN).
- d. Terdapat kontrak pembukaan rekening Efek nasabah yang tidak diisi lengkap dan tidak disertai dengan dokumen pendukung yang memadai.
- e. Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah (FPR) belum memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bapepam dan LK dalam Peraturan V.D.10.

⁴ Arsip Bapepam-LK, data sekunder yang telah diolah

- f. Bahwa tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen lain sehubungan dengan rekening Efek nasabah belum sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK.
- g. PT KJS belum membentuk unit kerja atau penugasan Direksi atau pegawai setingkat di bawah Direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

D.4 Efektivitas Pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal

Ada 4 unsur yang digunakan untuk menilai sejauh apa efektifitas pengawasan Bapepam terhadap perusahaan efek terkait prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang dikenal sebagai efektifitas hukum⁵. Efektifitas hukum yang dimaksud adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektifitas hukum itu ada 5 yaitu, substansi hukum, struktur hukum, budaya, fasilitas, budaya masyarakat.

1) Substansi

Melihat tingkat keefektifan melalui aspek substansi berarti menilai suatu pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dari sisi peraturan dan regulasi yang telah dibuat. Secara substansi, Bapepam telah memberikan pengaturan yang cukup jelas tentang penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek yang dituangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mewajibkan perusahaan efek untuk mengetahui latar belakang

⁵ Soejono Soekanto, **Op.cit**, hal 13

nasabahnya. Selain pasal tersebut Bapepam juga menetapkan Peraturan Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Secara substansi, apabila peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan efek menerapkan prinsip mengenal nasabah, maka masih terdapat celah hukum yang memungkinkan perusahaan efek tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah. Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Bapepam No. V.D.10 hanya mewajibkan perusahaan efek untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Namun demikian, pasal diatas tidak mengatur sanksi kepada perusahaan efek jika tidak menerapkan prinsip KYC.

Melihat uraian di atas, maka secara substansi pengawasan Bapepam dalam mencegah dan menangani perusahaan efek yang tidak menerapkan prinsip KYC masih belum efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan berupa tidak adanya unsur sanksi baik administratif maupun sanksi pidana terhadap perusahaan efek, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan efek untuk tidak melaksanakan prinsip KYC karena tidak adanya sanksi sebagai alat untuk memberi unsur jera.

2) Struktur

Melihat keefektifan dari aspek struktur berarti menilai pengawasan Bapepam dari sudut pandang aparat penegak hukum. Faktor kedua ini merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum disini tidak hanya pihak yang menerapkan hukum tetapi juga pihak yang membuat hukum. Faktor penegak hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hukum, karena mereka memiliki peran yang sangat besar dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum.

Struktur atau aparat penegak hukum disini adalah pihak-pihak yang berada di Bapepam. Pihak-pihak yang berada di Bapepam merupakan orang-orang yang telah melalui proses penyeleksian,

pelatihan, dan pengalaman yang cukup di bidang pasar modal sehingga dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman sudah cukup memadai. Namun dalam struktur ini Bapepam tidak berjalan sempurna karena sebagian pihak Bapepam yang belum melaksanakan dengan baik program pelatihan prinsip KYC kepada beberapa perusahaan efek. Dan jika sampai terjadi tindak pidana pencucian uang akibat dari tidak diterapkannya prinsip KYC, maka sudah seharusnya setiap kasus yang ada tidak hanya ditangani oleh Bapepam saja tetapi juga melibatkan polisi, jaksa, dan hakim. Namun selama ini dalam praktek, ketiga pihak tersebut tidak terjadi kerjasama. Penyebabnya karena terdapat pertentangan persepsi antara Bapepam dengan ketiga pihak tersebut, khususnya mengenai ada tidaknya laporan dan kerugian berkaitan dengan masalah alat bukti dan pengetahuan ketiga pihak tersebut terbatas tentang seluk beluk pasar modal. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum di bidang pasar modal menjadi lemah karena sanksi yang diterapkan tidak efektif. Seharusnya pihak-pihak yang turut serta dalam pencucian uang di pasar modal akibat tidak diterapkannya prinsip KYC dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi karena kurangnya koordinasi Bapepam dengan ketiga pihak tersebut membuat Bapepam tidak menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur pengadilan melainkan hanya dengan mengambil jalan tengah yaitu menerapkan sanksi administratif saja.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka secara struktur, pengawasan Bapepam dalam mencegah dan menangani perusahaan efek yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah masih belum efektif.

3) Budaya Masyarakat

Mengenai kultur, berarti bicara tentang tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan-aturan yang ada. Yang dimaksud masyarakat disini adalah pihak-pihak yang berada di dunia pasar modal khususnya perusahaan efek, investor, dan emiten. Secara

⁶ Wawancara dengan Bapak Endan, bagian pemeriksaan dan penyidikan, tanggal 14 November 2012, data primer telah diolah.

umum pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal adalah masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi menengah ke atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang yang berpendidikan dan berintelektual tinggi. Untuk lebih memudahkan investor dalam pembukaan rekening efek. Terkadang perusahaan efek mempermudah persyaratan pembukaan rekening, hal itu dilakukan karena investor tidak mau membuka rekening efek di perusahaannya sehingga dengan alasan itu perusahaan efek tidak menerapkan prinsip KYC selain itu juga sistem afiliasi di dunia pasar modal masih sangat begitu mengikat. Sifat manusia tidak akan pernah merasa puas akan sesuatu yang didapatnya. Karena hal tersebut, jika dilihat dari sisi investor maka investor akan memanfaatkan untuk melakukan pencucian uang di pasar modal.

Berdasarkan uraian di atas maka secara budaya masyarakat, pengawasan Bapepam dalam mencegah dan menangani perusahaan efek yang tidak menerapkan prinsip KYC masih belum efektif.

4) Fasilitas

Fasilitas berupa sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung efektifnya proses pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam. Tanpa adanya sarana dan prasarana, Bapepam dapat melakukan pengawasan terhadap proses aktivitas pelaku pasar modal. Sarana tersebut meliputi tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai,

D.5 Kendala Bapepam dalam Pengawasan Terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Pencucian Uang di Pasar Modal

Tidak diterapkannya prinsip KYC oleh perusahaan efek dapat menimbulkan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Kendala yang dihadapi Bapepam dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan efek

terkait prinsip KYC sebagai pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal disebabkan beberapa hal yaitu:⁷

1. Perusahaan efek yang belum membentuk unit kerja terkait unit kerja penerapan prinsip KYC. Ketika calon nasabah akan membuka rekening efek, maka profil atau latarbelakang dari nasabah tidak di dapat dengan rinci. Dan perusahaan efek akan sulit untuk memantau setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya.
2. Masih kentalnya sistem afiliasi dalam menarik nasabah. Sehingga bisa timbul terjadinya kerjasama antara pihak perusahaan efek dengan investor. Mengingat nasabah yang membuka rekening efek adalah orang yang berasal dari kalangan ekonomi menengah keatas, dapat diperkirakan para pejabat atau politisi sebagai nasabahnya sehingga di perusahaan efek akan memudahkan proses pembukaan rekening efek tanpa harus menerapkan adanya KYC.
3. Lemahnya pengaturan perundang-undangan di bidang penerapan prinsip KYC Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 36 dan Peraturan Bapepam V.D.10 yang belum terdapatnya sanksi pidana jika perusahaan efek tidak menerapkan prinsip KYC.
4. Terkait masalah pembuktian apabila sudah terjadi pencucian uang akibat dari tidak diterapkannya prinsip KYC oleh perusahaan efek. Pergerakan saham dalam bursa sangat cepat, sehingga sulit diprediksikan jika terjadi transaksi tidak wajar apakah transaksi itu termasuk money laundry atau kejahatan pasar modal lainnya seperti insider trading. Selain itu juga proses pemeriksaan dan penyidikannya melibatkan pihak lain seperti PPATK, kepolisian, BEI, dll.
5. Tidak ada kerjasama antara Bapepam dengan pihak kepolisian, kejaksaan apabila sampai terjadi *money laundering* di pasar modal. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat dalam pemeriksaan dan penyidikan, karena dalam hal ini pihak kejaksaan dan kepolisian tidak begitu paham mengenai kejahatan pasar modal sehingga untuk

⁷ Wawancara Ibu Valentine, **Op.cit**, data primer yang telah diolah.

meneruskan kepada sanksi pidana butuh waktu yang sangat lama bahkan pihak bapepam sering tidak meneruskan pada sanksi pidana karena proses yang lama dan rumit.

D.5 Upaya Bapepam dalam Mengawasi Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Pencucian Uang di Pasar Modal

Bapepam dalam melakukan pengawasan baik yang bersifat preventif maupun represif mengalami beberapa kendala atau hambatan yang telah diuraikan di atas, maka untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Bapepam melakukan upaya-upaya sebagai berikut :⁸

1. Pihak bapepam bagian Biro Pengawasan Perusahaan Efek telah mengadakan evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi prinsip KYC serta pelatihan dan pengembangan SDM perusahaan efek bagian unit kerja yang menangani prinsip KYC. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan dengan beberapa metode yaitu:
 - a) Program sosialisasi dengan metode *Training For Trainers* (TFT) ke perusahaan efek secara berkala dan perusahaan efek harus mempunyai unit kerja untuk dilatih dalam penerapan prinsip KYC.
 - b) Melakukan penelusuran secara berkala apakah program tersebut sudah dijalankan atau belum selama 6 bulan sekali⁹.

Dalam sosialisasi ini Kemudian Bapepam melakukan pemberian materi prinsip KYC pada setiap pelatihan yang ada. Kemudian menyampaikan tata cara mengenai mekanisme verifikasi atau pengkinian data nasabah, flowchart mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, penyampaian daftar nasabah *high risk*. Adapun upaya Bapepam untuk lebih memudahkan para pegawai perusahaan efek yaitu dengan dibuatkannya video dan briefing kit

⁸ **Ibid.**

⁹ Annual Report Bapepam-LK 2007

terkait penerapan prinsip KYC dan resikonya. Sehingga diharapkan pada saat penerapan prinsip KYC nanti petugas perusahaan efek dapat menjalankan secara efektif.

2. Bapepam lebih intens memantau perusahaan efek dalam penerimaan nasabah dengan mengecek data-data atau profil nasabah untuk menghindari sistem afiliasi antara calon nasabah dengan perusahaan efek serta memantau perusahaan efek dalam hal menjual atau membeli efek.
3. Akan dilakukan amandemen peraturan Bapepam mengenai Prinsip KYC bagi perusahaan efek dan setiap perusahaan efek wajib memiliki peraturan mengenai prinsip KYC yang dibuat oleh perusahaannya sendiri.
4. Melakukan pemantauan terhadap setiap transaksi yang dilakukan perusahaan efek dalam jual beli efek, dan melakukan pengkajian data nasabah jika terjadi transaksi mencurigakan sebagai pembuktian apa hal tersebut termasuk pelanggaran prinsip KYC atau tindak kejahatan pasar modal yang lain.
5. Melakukan kerjasama dan program pelatihan kepada penyidik dari kepolisian dan kejaksaan tentang seluk beluk kejahatan pasar modal terutama dalam hal pemeriksaan kasus *money laundering*.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

1. Efektifitas pengawasan Bapepam terhadap perusahaan efek terkait penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal belum efektif karena masih terdapat

beberapa kekurangan dan kelemahan pada faktor substansi, struktur, kultur dan fasilitas :

a.) Substansi

Peraturan belum menjerat sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap perusahaan efek sehingga tidak memberikan efek jera apabila perusahaan efek melanggar pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Bapepam No. V.D.10, belum mengatur larangan terhadap perusahaan efek yang dalam penerimaan nasabahnya berdasarkan hubungan afiliasi sehingga dalam pembukaan rekening efek dipermudah dengan tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah.

b.) Struktur

Belum melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kejahatan pasar modal. Hal ini disebabkan keterbatasan aparat penegak hukum tersebut mengenai kejahatan pasar modal, sehingga penegak hukumnya tidak maksimal yang berakibat tidak dapat diterapkannya sanksi pidana.

c.) Kultur

Prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal telah diketahui oleh pelaku pasar modal. Namun hal tersebut terbentur masalah hubungan afiliasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan efek dalam melakukan penerimaan nasabah sehingga hal ini dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan pencucian uang di pasar modal.

d.) Fasilitas

Selama ini Bapepam telah memiliki tenaga manusia yang ahli dalam kejahatan pasar modal, hubungan antara Bapepam dengan SRO yang saling berkoordinasi, dan peralatan yang sudah cukup memadai dengan menggunakan perangkat JATS yang dapat mendeteksi volume

perdagangan dan program Bapepam yang rutin dijalankan terhadap perusahaan efek dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga pengawas.

2. Kendala yang dihadapi

- a.) Terdapat beberapa perusahaan efek yang belum membentuk unit kerja khusus terkait penerapan prinsip KYC.
- b.) Lemahnya pengaturan perundang-undangan terhadap perusahaan efek khususnya yang berkaitan dengan penerimaan nasabah yang harus menerapkan prinsip mengenal nasabah.
- c.) Masih terciptanya hubungan afiliasi dalam pasar modal Indonesia.
- d.) Pembuktian yang cukup sulit karena melibatkan banyak pihak dan adanya unsur kerahasiaan yang harus dijaga oleh Bapepam dalam menangani kasus tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek yang berujung pada pencucian uang di pasar modal.
- e.) Tidak ada kerjasama antara Bapepam dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan jika sampai terjadi pencucian uang di pasar modal karena tidak diterapkannya prinsip KYC.

3. Upaya Bapepam dalam Pengawasan terhadap perusahaan efek terkait prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah Pencucian Uang di Pasar Modal

- a.) Pihak Bapepam berusaha melakukan sosialisasi ke perusahaan efek melalui metode Training For Trainers (TFT) secara berkala.
- b.) Mewajibkan perusahaan efek membentuk unit kerja khusus untuk dilatih dalam penerapan prinsip KYC.
- c.) Berusaha melakukan amandemen peraturan Bapepam terkait penerapan prinsip KYC dalam rangka mencegah pencucian uang di pasar modal.
- d.) Mewajibkan perusahaan efek mempunyai peraturan mengenai prinsip KYC yang dibuat oleh perusahaanannya sendiri.
- e.) Melakukan pemantauan setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan efek.

- f.) Melakukan program pelatihan kepada penyidik dari kepolisian dan kejaksaan tentang kejahatan pasar modal dan melakukan kerjasama pembuatan MOU kerjasama.

E.2 Saran

Saran yang diberikan oleh penulis setelah menguraikan pembahasan yang telah diperoleh kesimpulan sebagaimana di atas adalah untuk Bapepam agar melakukan sosialisasi metode Training For Trainer (TFT) kepada perusahaan efek yang belum memiliki unit kerja khusus prinsip KYC dan melakukan pemantauan kepada perusahaan efek terhadap segala kegiatan yang dilakukan. Bapepam juga harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan efek yang tidak menerapkan prinsip KYC dengan memberikan sanksi-sanksi yang berat terhadap pelanggaran yang dilakukan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

F. Daftar Pustaka

- Handyaningrat, Soewono. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Bandung: PT. Alumni.
- Hamud M. Balfas, 2012. *Hukum Pasar Modal indonesia*, Jakarta: Tatanusa.
- Tavinayati dan Yulia. 2009. *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tunggal, Iman,S. 2000. *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di indonesia*, Jakarta: Haravindo.
- Usman, Marzuki. 1994. *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: IBI.
- Wiyono, Bambang, B. 2007. *Metodologi Penelitian*, Malang: Rosindo Malang.
- Yustiavanda, Ivan, dkk., 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.